

Lulus STAN Bareng Rafael Alun, Pimpinan KPK ALex Tepis Benturan Kepentingan

Wakil Ketua Alexander Marwata angkat bicara soal sorotan perkenalannya dengan Trisambodo. ICW menyoroti soal adanya potensi konflik kepentingan lantaran Rafael Alun sedang diselidiki KPK. Alex dan Rafael sama-sama lulus dari pendidikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1986. Relasi keduanya pun dinilai punya potensi mempengaruhi penyelidikan kasus Rafael Alun. Namun, Alex menegaskan bahwa dirinya tidak punya keterkaitan dengan Rafael Alun. "Enggak ada benturan kepentingan. Saya enggak ada hubungan bisnis dengan yang bersangkutan," kata Alex kepada wartawan, Kamis (16/3). Menurut Alex, ia pun sudah memberi tahu koleganya di KPK perihal perkenalannya dengan Rafael Alun. "Dalam rapat membahas perkara RAT pun sudah saya sampaikan kalau saya kenal baik dengan yang bersangkutan. Sebelum perkara RAT ada 3 orang teman angkatan saya yang diproses di KPK," ujar Alex yang tidak menyebut kasus terkait. ICW menyoroti soal adanya potensi konflik kepentingan tersebut. Menurut ICW, Alex harus secara terbuka mendeklarasikan potensi benturan keuntungannya kepada Pimpinan KPK lain dan Dewan Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a PerKom 5/2019. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut, jika pimpinan KPK lain dan Dewan Pengawas menilai relasi keduanya potensi benturan kepentingan di atas faktual serta berdampak besar terhadap netralitas pekerjaan, maka Alex harus dibatasi dalam pelaksanaan tugas terkait Rafael Alun. KPK turut bicara soal isu tersebut. Aturan soal benturan kepentingan itu diakui memang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyebut bahwa penanganan perkara yang dilakukan akan tetap profesional. "Bahwa terkait satu alumni, satu angkatan, bahkan misalnya ada hubungan kekerabatan antara insan KPK dengan pihak yang sedang diusut kasusnya, seringkali terjadi. Karena kita semua makhluk sosial," kata Ali. "Kami pastikan, penyelesaian setiap kasus di KPK dilakukan secara profesional dalam sebuah sistem kelembagaan dengan mekanisme yang ketat dan terukur," imbuhnya. Menurut Ali, insan KPK akan paham dan harus bila memang ada potensi benturan kepentingan. Sehingga insan KPK

itu tidak ikut dalam suara pengambilan keputusan. "Sebagai penegasan, pengambilan keputusan di KPK tidak pernah hanya atas dasar pendapat 1 orang semata," ujar Ali. Ali menambahkan, kerja-kerjaKPK selalu dalam bentuk team work dan tersistem, termasuk Pimpinan KPK yang berjumlah 5 orang. "Maka dilakukan pengambilan keputusan kolektif kolegial yang artinya setiap keputusan akan dilakukan dengan pendapat masing-masing pimpinan secara bebas," papar Ali. "Jadi tidak pernah ditentukan dan diputuskan oleh hanya salah satu pimpinan saja," sambungnya. Saat ini, kasus Rafael Alun disebut sudah naik tahap penyelidikan di KPK. Ini berdasarkan pernyataan Deputy Pencegahan dan Monitor Pahala Nainggolan. Dalam tahap ini, bila ditemukan cukup bukti dan tindak pidananya, maka akan dinaikkan penyidikan serta penetapan tersangka. Rafael Alun sudah diperiksa KPK tapi terkait klarifikasi LHKPN. Untuk menjalankan sumber harta Rp 56 miliar yang dinilai tak wajar. Tidak sesuai profil sebagai seorang pejabat eselon tiga. Sorotan terakhir ialah terbongkarnya deposit box milik Rafael Alun senilai Rp 37 miliar. PPATK menduga isi kotak uang tersebut merupakan hasil suap.